

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
DISTRIK PANIAI TIMUR KABUPATEN PANIAI**

Manase Tenouye¹, Marja Sinurat², Tjahjo Suprajogo³

^{1,2,3}Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia

Email Korespondensi: manase0907@gmail.com

Email: dr.marjasinurat@gmail.com, tjahjosuprajogo@ipdn.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe and analyze village fund management in community empowerment in the East Paniai District, Paniai Regency. The study also describes and analyzes supporting and inhibiting factors in village fund management in community empowerment in the East Paniai District, Paniai Regency. The study also describes and analyzes efforts to overcome these inhibiting factors in village fund management in community empowerment in the East Paniai District, Paniai Regency. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach, focusing on the dimensions of community empowerment through: enabling, strengthening, protecting, supporting, and maintaining. Data were obtained through data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the management of village funds in community empowerment in the East Paniai District of Paniai Regency is still not running well or is less successful.

Keywords: Village fund management, Community participation, Community empowerment.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai serta mendeskripsikan dan menganalisis upaya mengatasi faktor penghambat pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan dimensi pemberdayaan masyarakat melalui: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai masih kurang berjalan dengan baik atau kurang berhasil.

Kata kunci: Pengelolaan dana desa, Partisipasi masyarakat, Pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah tertinggal seperti Papua. Salah satu instrumen penting untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah kebijakan Dana Desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan kewenangan dan sumber dana langsung kepada desa agar dapat mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat yang berlaku. Adanya Dana Desa di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kampung. Distrik Paniai Timur, sebagai salah satu distrik di Kabupaten Paniai, memiliki sejumlah kampung dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

123

Indexed

SINTA 4



PKP|INDEX



pertanian tradisional, perikanan darat, serta usaha kecil berbasis sumber daya alam lokal. Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai kendala dalam aspek pengelolaan, perencanaan, serta pemanfaatan dana desa secara efektif dan berkelanjutan.

Dana Desa resmi digulirkan sejak Tahun 2015, melalui mekanisme transfer langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ke Rekening Pemerintah Daerah sebelum akhirnya ke desa. Ini menjadi pilar penting dalam reformasi tata kelola desa di Indonesia. Program pemberian dana desa merupakan konsekuensi langsung dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan banyak kewenangan kepada desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara mandiri. Diluncurkannya Dana Desa oleh pemerintah bertujuan memperkuat otonomi desa, mempercepat pembangunan, serta mendorong pemerataan dan pengurangan ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Pengelolaan Dana Desa memiliki potensi besar untuk memberdayakan desa namun memerlukan fondasi tata kelola yang kuat, pelibatan warga, dan peningkatan kapasitas agar benar-benar efektif dan berkelanjutan.

Tabel 1: Dana Desa Kabupaten Paniai 2020-2024

No.	Tahun	Alokasi Dana Desa
1.	2020	7.434.447.930
2.	2021	8.631.000.000
3.	2022	9.168.453.000
4.	2023	10.237.190.400
5.	2024	12.040.457.400
Jumlah		47.511.548.730

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Paniai Tahun 2025

Dari data yang penulis peroleh di lapangan pemerintah telah mengucurkan dana desa di Kabupaten Paniai dalam lima tahun terakhir, dimana Tahun 2020 sebesar Rp, 7.434.447.930, ditahun 2021 peningkatan menjadi sebesar 8.631.000.000, ditahun 2022 mengalami peningkatan menjadi Rp. 9.168.453.000.000, tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 10.237.190.400 dan ditahun 2024 mengalami menjadi sebesar Rp. 12.040.457.400, Dana desa tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, dibidang pelaksanaan pembangunan, dibidang pemberdayaan masyarakat. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat kampung yang belum mempunyai pendamping Desa salah satunya di Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai. Dengan ketidak beradaanya pendamping desa membuat penggunaan dana desa menjadi kurang terarah khususnya dibidang pemberdayaan masyarakat yang ada di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai.

Kampung-kampung di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai dalam pengelolaan dana desa melalui perencanaan, pelekasanaan, pengawasan, serta pelaporan yang baik. Dibidang pelaksanaan pembangunan desa melaksanakan pembangunan plengsengan atau tulus, jalan makam dan, jembatan, pembangunan bendungan air, serta sanitasi lingkungan, pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), pengadaan alat kesehatan, pengembangan teknologi tepat guna, pembangunan perpustakaan desa, sistem informasi desa. Sedangkan dibidang pemberdayaan masyarakat desa di antaranya pelatihan tim pengelolaan kegiatan, pembinaan fasilitas bantuan hukum kepada masyarakat, pengembangan kapasitas tembaga kemasyarakatan, pengembangan sistem informasi desa, pengembangan potensi desa, pengembangan perencanaan partisipatif, pelatihan usaha ekonomi, dan peratihan usaha kewirausahaan. Namun program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan belum memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Paniai.

Kabupaten Paniai mencatat tingkat kemiskinan yang masih sangat tinggi. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan mencapai 36,71%, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 36,59%, namun pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 36,63%, tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 35,59%, dan tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 37,07%,

angka ini masih jauh tertinggal dari harapan dan bahkan tertinggal jauh, jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Faktor-faktor yang mendasari tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Paniai perlu mendapatkan perhatian serius, karena hal ini mencerminkan tidaksetaraan ekonomi yang signifikan dan akses terhadap layanan dasar yang masih terbatas.

Secara ideal, pengelolaan dana desa diarahkan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan perempuan, peningkatan pelayanan sosial dasar, serta penguatan kelembagaan desa. Akan tetapi, di lapangan sering muncul persoalan seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan program, serta keterbatasan kapasitas aparatur kampung dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan hasil pemberitaan dan data lokal, sejumlah masalah pembangunan di Distrik Paniai Timur turut menghambat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, antara lain kondisi keamanan yang belum stabil, infrastruktur dasar yang terbatas, serta partisipasi masyarakat yang masih rendah. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat sempat terganggu akibat konflik bersenjata serta bencana alam seperti banjir bandang di Kampung Uwibutu (Antara Papua, 2021). Situasi ini berdampak pada rendahnya efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kampung.

Selain itu, hasil evaluasi umum terhadap pelaksanaan Dana Desa di Papua menunjukkan bahwa sebagian besar program masih bersifat top-down dan belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Keterbatasan dalam pengawasan dan evaluasi juga menyebabkan penggunaan dana belum optimal dalam mendorong kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mengandung arti berdaya atau mampu. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang kurang beruntung agar dapat mengatasi keadaan tersebut. Pemberdayaan adalah usaha dalam hal meningkatkan kapabilitas kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, membangkitkan, memotivasi akan potensi yang dimiliki dan dapat bekerja keras untuk mengembangkan potensi tersebut (Zubaedi, 2013: 45-46).

Konsep pemberdayaan erat kaitannya dengan 2 konsep utama yaitu konsep daya (*power*) dan konsep ketimpangan (*disadvantage*). Pemberdayaan mengacu pada kemampuan individu, terutama pada kelompok lemah sehingga kelompok tersebut memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan utamanya. Disisi lain masyarakat juga terbebas dari kelaparan, kemiskinan, kebodohan, serta mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan dan kebutuhan primer ataupun sekunder dan ikut serta dalam pembangunan masyarakat (Suharto, 2005: 58). Menurut Sumaryadi (2005: 11) menjelaskan bahwa: Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Lebih lanjut Huraerah (2008: 87) mengatakan bahwa: Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki. Kedua pendapat di atas menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya mempersiapkan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan kemandirian dan kesejahteraan sehingga mampu menemukan alternatif solusi yang baik dalam menjalankan kehidupannya. Kemudian menurut Mardikanto & Soebiantro (2015: 10) pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma baru dalam pembangunan, dimana pemberdayaan memiliki tujuan untuk mengembangkan masyarakat. Bentuk partisipasi yang diharapkan adalah masyarakat mampu mendefinisikan dan mencoba memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Lebih lanjut Maryani & Roselin (2019: 8) menjelaskan juga bahwa: Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat

masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan social dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi pada intinya kata kunci dari pemberdayaan masyarakat adalah meliputi: proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri.

METODE

Desain penelitian menurut Arikunto (2004: 44), adalah “rencana atau rancangan yang dibuat oleh penulis sebagai ancar-ancar kegiatan yang dilaksanakan”. Atau dengan kata lain “desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian” (Suchman dalam Nazir, 2005: 84). Selanjutnya, mengenai makna metode, secara etimologis Rusidi (2002: 1) membatasi pada pemikiran bahwa: Cara berpikir dan cara melaksanakan hasil berpikir (teknik) guna melakukan suatu pekerjaan secara lebih baik dalam mencapai tujuannya (secara efektif). Sedangkan kata penelitian diartikan sebagai suatu upaya yang bermaksud mencari jawaban yang benar terhadap suatu realita yang dipikirkan (dipermasalahan) dengan menggunakan metode-metode tertentu atau cara berpikir atau teknik tertentu menurut prosedur sistematis, yang bertujuan menemukan, mengembangkan dan atau menerapkan pengetahuan, ilmu dan teknologi, yang berguna baik bagi aspek keilmuan maupun bagi aspek guna laksana atau praktis.

Guna memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya serta untuk mengetahui secara empirik fenomena dari permasalahan yang diteliti, maka metode yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sehubungan dengan itu, maka data diperoleh dan disajikan melalui penggunaan kata-kata untuk memperoleh gambaran yang setepat mungkin dengan realitas. Pemilihan metode ini diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan Rusidi (2002: 18) bahwa “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud menggambarkan (mendeskripsi) fenomena empirik yang disertai penafsiran-penafsirannya, dengan tujuan memperoleh gambaran setepat realitanya atau sering juga disebut dengan penelitian *a posteriori*”. Ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar (2000: 199) bahwa “penelitian deskriptif ingin mendapatkan gambaran atau penjelasan (*description*) secara tepat tentang situasi, gejala, fenomena, karakteristik baik dari individu atau kelompok tertentu yang diteliti sebagaimana adanya”. Metode ini juga mendapat dukungan teoretis dari Bogdan dan Taylor dalam Moleong, (2007: 4) yang memberikan batasan tidak jauh berbeda: Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Dilihat dari teknik perolehan data, Kirk dan Miller dalam Moleong (2007: 3) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007: 6). Melalui metode penelitian tersebut, penulis berusaha mendapatkan gambaran pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai.

PEMBAHASAN

Pengetahuan Hasil Dari Proses Pengalaman Masyarakat Distrik Paniai Timur dalam Menggunakan Dana Desa untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa pada dasarnya terbentuk melalui proses pengalaman yang dialami secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman tersebut diperoleh masyarakat melalui keterlibatan dalam musyawarah kampung, pelaksanaan kegiatan pembangunan, kegiatan pemberdayaan masyarakat, maupun pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa di lingkungan masing-masing. Di Distrik Paniai Timur, pemahaman masyarakat terhadap Dana Desa terus berkembang seiring dengan meningkatnya pelaksanaan program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung.

Masyarakat Distrik Paniai Timur pada umumnya memahami bahwa Dana Desa merupakan bantuan anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada desa atau kampung untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan tersebut diperoleh masyarakat melalui sosialisasi pemerintah kampung, pendamping desa, tokoh masyarakat, serta pengalaman langsung dalam mengikuti berbagai kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program turut memberikan pemahaman yang lebih nyata mengenai tujuan dan manfaat Dana Desa. Berdasarkan Wawancara dengan kepala kampung Iyaitaka mengatakan bahwa: "Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dinilai memberikan dampak yang cukup positif terhadap peningkatan kemampuan dan partisipasi warga".

Lebih Lanjut Kaur Keuangan Kampung Iyaitaka menyatakan bahwa: "Program pemberdayaan yang dilaksanakan di Distrik Paniai Timur meliputi pelatihan keterampilan masyarakat, bantuan usaha ekonomi produktif, dukungan terhadap kelompok tani, pembinaan pemuda, pemberdayaan perempuan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya".

Melalui kegiatan tersebut masyarakat memperoleh pengalaman baru yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran akan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat. Dalam proses pelaksanaannya, menurut Masyarakat kampung Iyaitaka menyatakan bahwa: "Kami sebagai masyarakat mengakui bahwa pengalaman mengikuti kegiatan pemberdayaan memberikan pemahaman bahwa Dana Desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik semata, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia".

Selanjutnya menurut Kepala Distrik Paniai Timur menyatakan bahwa: "Sebelumnya sebagian masyarakat beranggapan bahwa pembangunan desa hanya identik dengan pembangunan jalan, jembatan, atau bangunan lainnya. Namun setelah terlibat dalam kegiatan pemberdayaan, masyarakat mulai memahami bahwa peningkatan kapasitas masyarakat juga merupakan bagian penting dari pembangunan desa".

Pengalaman masyarakat dalam mengikuti musyawarah kampung juga menjadi salah satu faktor yang membentuk pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa, sebagai mana yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Distrik Paniai Timur menyatakan bahwa: "Pengalaman masyarakat dalam musyawarah diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan, kebutuhan, dan aspirasi terkait program yang dianggap penting bagi masyarakat kampung. Proses tersebut memberikan pengalaman demokratis kepada masyarakat sehingga mereka merasa ikut memiliki program yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung".

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kegiatan Dana Desa juga memberikan pengetahuan baru mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Masyarakat mulai memahami bahwa penggunaan Dana Desa harus dilakukan secara terbuka, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pengetahuan ini tumbuh melalui pengalaman masyarakat ketika melihat langsung proses pelaksanaan kegiatan, pembagian bantuan, maupun penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh aparat kampung. Berdasarkan pengalaman Masyarakat kampung Kogekotu menyatakan bahwa: "Kegiatan pemberdayaan yang paling dirasakan manfaatnya

adalah kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Bantuan bibit pertanian, pelatihan keterampilan kerja, bantuan alat usaha, dan dukungan terhadap kelompok usaha kecil dinilai mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan keluarga”.

Pengalaman tersebut membuat masyarakat semakin memahami bahwa Dana Desa memiliki peran penting dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat kampung. Masyarakat juga menyampaikan bahwa pengalaman terlibat dalam kegiatan pemberdayaan memberikan perubahan terhadap pola pikir masyarakat sebagaimana yang diungkapkan oleh Masyarakat kampung Pudotadi bahwa: ”Sebagian masyarakat yang sebelumnya hanya bergantung pada bantuan pemerintah mulai memiliki kesadaran untuk mengembangkan usaha dan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia”.

Penguatan

Penguatan menurut Suharto (2005) adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Dalam penelitian ini dimensi penguatan dijabarkan menjadi dua indikator sebagai berikut:

Pendidikan yang Diperoleh dengan Adanya Dana Desa Untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Distrik Paniai Timur

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan masyarakat karena melalui pendidikan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam menjalani kehidupan sosial maupun ekonomi. Dalam pelaksanaan Dana Desa di Distrik Paniai Timur, sektor pendidikan menjadi salah satu bagian yang memperoleh perhatian melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran Dana Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pembelajaran, baik melalui pendidikan formal maupun kegiatan nonformal yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kampung. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Paniai Masyarakat Distrik Paniai Timur menyatakan bahwa: ”Pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum adanya Dana Desa, sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan akses terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dapat membantu meningkatkan kemampuan masyarakat”.

Lebih lanjut Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai mengatakan bahwa: ”Keterbatasan sarana, kondisi geografis, dan rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya akses pendidikan masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, keberadaan Dana Desa dinilai membantu masyarakat dalam memperoleh kesempatan belajar dan meningkatkan kemampuan diri”.

Selanjutnya Kepala Distrik Paniai Timur mengatakan bahwa: ”Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai Dana Desa, masyarakat memperoleh berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kampung. Pendidikan yang diberikan tidak hanya berupa pendidikan akademik, tetapi juga pendidikan keterampilan, pendidikan sosial, pendidikan ekonomi, dan pendidikan tentang pengelolaan pembangunan kampung”.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Salah satu bentuk pendidikan yang diperoleh masyarakat salah satunya pendidikan keterampilan kerja dan usaha ekonomi produktif sebagaimana yang diungkap oleh Kepala Seksi Pemerintahan Distrik Paniai Timur bahwa: ”Pemerintah kampung bersama pendamping desa melaksanakan berbagai pelatihan seperti pelatihan pertanian, peternakan, kerajinan tangan, pengolahan hasil pertanian, serta pengelolaan usaha kecil masyarakat”.

Melalui kegiatan tersebut masyarakat memperoleh pengetahuan baru mengenai cara mengembangkan usaha dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang tersedia di lingkungan masyarakat. Selain

pendidikan keterampilan, masyarakat juga memperoleh pendidikan mengenai pentingnya partisipasi dalam pembangunan kampung sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala kampung Iyaitaka bahwa: "Melalui kegiatan musyawarah kampung, sosialisasi, dan pelatihan masyarakat mulai memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan Dana Desa".

Pendidikan tersebut membentuk kesadaran masyarakat bahwa pembangunan kampung bukan hanya tanggung jawab pemerintah kampung, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Pendidikan yang diperoleh masyarakat melalui kegiatan Dana Desa juga berkaitan dengan pengelolaan organisasi dan administrasi masyarakat sebagaimana yang diungkapkan Kaur Keuangan Kampung Iyaitaka bahwa: "Beberapa kegiatan pemberdayaan memberikan pelatihan kepada kelompok masyarakat mengenai cara menyusun administrasi kelompok, mengelola bantuan usaha, menyusun laporan kegiatan, serta mengatur keuangan kelompok masyarakat".

Pengetahuan tersebut sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan kelompok usaha maupun organisasi masyarakat yang lebih tertib dan teratur. Masyarakat Distrik Paniai Timur juga memperoleh pendidikan mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Masyarakat kampung Iyaitaka bahwa: "Pemerintah kampung memberikan penjelasan kepada kami mengenai penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta pertanggungjawaban program yang telah dilaksanakan".

Pendidikan tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Dana Desa harus digunakan secara terbuka dan bertanggung jawab demi kepentingan bersama masyarakat kampung. Walaupun demikian, dalam pelaksanaan pendidikan melalui kegiatan Dana Desa masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi masyarakat sebagaimana yang diungkapkan Kepala Kampung Kogekotu bahwa: "Salah satu kendala utama pemberdayaan masyarakat adalah rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami materi pelatihan atau administrasi kegiatan. Selain itu, keterbatasan tenaga pendamping dan fasilitas pelatihan juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat".

Perlindungan

Perlindungan menurut Suharto (2005) adalah melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan. Dalam penelitian dimensi perlindungan dijabarkan menjadi dua indikator sebagai berikut:

Konsultasi Bertukar Pikiran Dalam Memecahkan Masalah Menggunakan Dana Desa Untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Konsultasi dan bertukar pikiran merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang sangat penting dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Melalui proses konsultasi, masyarakat dapat menyampaikan pendapat, memberikan masukan, serta mencari solusi bersama terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kampung. Di Distrik Paniai Timur, kegiatan konsultasi dan musyawarah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses penggunaan Dana Desa karena masyarakat memiliki peranan penting dalam menentukan arah pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kampung. Pelaksanaan konsultasi dalam penggunaan Dana Desa di Distrik Paniai Timur dilakukan melalui musyawarah kampung sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Paniai bahwa: "Pelaksanaan konsultasi dalam penggunaan Dana Desa di Distrik Paniai Timur dilakukan melalui musyawarah kampung yang melibatkan pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, pendamping desa, dan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut masyarakat diberikan kesempatan

untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kampung”.

Proses bertukar pikiran tersebut menjadi sarana untuk membangun kesepahaman bersama mengenai program yang dianggap prioritas untuk dilaksanakan melalui Dana Desa. Lebih lanjut Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai menyatakan bahwa: ”Masyarakat Distrik Paniai Timur memandang bahwa konsultasi sangat penting karena setiap kampung memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda-beda. Dengan adanya konsultasi, masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sehingga program yang dilaksanakan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kegiatan konsultasi juga membantu masyarakat memahami tujuan penggunaan Dana Desa dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan”.

Selanjutnya Kepala Distrik Paniai Timur menyatakan bahwa: ”Dalam proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, konsultasi dilakukan tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga pada tahap pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Pada tahap perencanaan, masyarakat bersama pemerintah kampung mendiskusikan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, sasaran kegiatan, serta kebutuhan anggaran yang diperlukan. Pada tahap pelaksanaan, konsultasi dilakukan untuk membahas kendala-kendala yang muncul di lapangan dan mencari solusi agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan pada tahap evaluasi, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai hasil kegiatan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat”.

Salah satu bentuk konsultasi yang sering dilakukan di Distrik Paniai Timur adalah pembahasan mengenai kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut masyarakat bersama pemerintah kampung berdiskusi mengenai jenis usaha yang sesuai dengan kondisi masyarakat, potensi sumber daya lokal, serta bentuk bantuan yang dibutuhkan masyarakat. Melalui proses bertukar pikiran tersebut, masyarakat dapat menentukan kegiatan yang dianggap paling bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung. Selain dalam bidang ekonomi, konsultasi juga dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan pertanian sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Distrik Paniai Timur: ”Sebagian besar masyarakat Distrik Paniai Timur bekerja sebagai petani sehingga berbagai permasalahan pertanian sering menjadi topik pembahasan dalam musyawarah kampung. Masyarakat berdiskusi mengenai kebutuhan bibit, alat pertanian, pelatihan pertanian, serta cara meningkatkan hasil produksi pertanian”.

Konsultasi tersebut membantu masyarakat dan pemerintah kampung dalam menentukan program pertanian yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan konsultasi juga memberikan manfaat dalam meningkatkan hubungan sosial antar masyarakat. Proses bertukar pikiran mendorong masyarakat untuk saling mendengarkan pendapat, menghargai perbedaan pandangan, dan mencari solusi secara bersama-sama. Kondisi tersebut memperkuat rasa kebersamaan dan semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat Distrik Paniai Timur. Masyarakat mulai memahami bahwa keberhasilan pembangunan kampung tidak hanya bergantung pada pemerintah kampung, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat.

Dalam pelaksanaan Dana Desa, konsultasi juga menjadi sarana untuk meminimalkan konflik atau kesalahpahaman di tengah masyarakat. Dengan adanya komunikasi terbuka antara pemerintah kampung dan masyarakat, berbagai persoalan yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa dapat dibahas secara bersama-sama sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala kampung Iyaitaka bahwa: ”Apabila terdapat masyarakat yang merasa belum memperoleh manfaat program secara merata, maka permasalahan tersebut dapat dibicarakan dalam musyawarah kampung sehingga dapat ditemukan solusi yang adil bagi seluruh masyarakat”.

Lebih lanjut Kepala Kampung Kogekotu bahwa: ”Peran tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam kegiatan konsultasi sangat penting karena masyarakat Distrik Paniai Timur masih memiliki hubungan sosial dan adat yang kuat. Tokoh adat sering menjadi penengah dalam proses diskusi apabila terdapat perbedaan pendapat antar masyarakat. Selain itu, tokoh masyarakat juga membantu memberikan arahan

dan masukan kepada masyarakat agar pelaksanaan kegiatan Dana Desa dapat berjalan dengan baik dan tetap menjaga keharmonisan masyarakat kampung”.

Pemerintah kampung dan pendamping desa juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi kegiatan konsultasi masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Kampung Pudotadi bahwa: ”Pemerintah kampung bertugas memberikan informasi mengenai penggunaan Dana Desa, menjelaskan program yang akan dilaksanakan, serta mendengarkan aspirasi masyarakat sedangkan pendamping desa membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan penggunaan Dana Desa dan tata cara pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat”.

Dengan adanya pendampingan tersebut masyarakat menjadi lebih memahami proses penggunaan Dana Desa dan lebih aktif dalam memberikan pendapat. Melalui kegiatan konsultasi dan bertukar pikiran, masyarakat Distrik Paniai Timur juga memperoleh pengetahuan mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Masyarakat mulai memahami bahwa penggunaan Dana Desa harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat merasa memiliki hak untuk mengetahui penggunaan anggaran dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kampung.

Pemeliharaan

Pemeliharaan menurut (2005) adalah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Dalam penelitian ini dimensi pemeliharaan dijabarkan menjadi dua indikator sebagai berikut:

Perhatian Sikap Masyarakat Distrik Paniai Timur Dalam Kepekaan Terhadap Penggunaan Dana Desa Untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Perhatian dan sikap masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kampung. Sikap masyarakat yang peduli, aktif, dan memiliki kepekaan terhadap penggunaan Dana Desa akan mendorong terciptanya pembangunan kampung yang lebih transparan, partisipatif, dan tepat sasaran. Di Distrik Paniai Timur, perhatian masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa terus berkembang seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung.

Masyarakat Distrik Paniai Timur pada umumnya memahami bahwa Dana Desa merupakan anggaran yang diberikan pemerintah untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kampung sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Paniai bahwa: ”Kesadaran tersebut mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan bagaimana Dana Desa digunakan oleh pemerintah kampung. Masyarakat mulai memahami bahwa penggunaan Dana Desa bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kampung, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dan pengawasan masyarakat agar program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas”.

Perhatian masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah kampung sebagaimana yang diungkapkan oleh Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai bahwa: ”Dalam kegiatan tersebut masyarakat memberikan pendapat, menyampaikan kebutuhan masyarakat, dan ikut menentukan program yang dianggap prioritas bagi masyarakat kampung”.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian terhadap pembangunan kampung dan ingin memastikan bahwa penggunaan Dana Desa dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain dalam proses perencanaan, perhatian masyarakat juga terlihat dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang

diungkapkan oleh Kepala Distrik Paniai Timur bahwa: "Masyarakat mulai aktif memperhatikan pelaksanaan program yang dibiayai Dana Desa, seperti kegiatan pelatihan masyarakat, bantuan usaha ekonomi produktif, bantuan pertanian, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Masyarakat ingin memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berjalan sesuai rencana dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kampung".

Kepekaan masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa juga dipengaruhi oleh pengalaman masyarakat dalam merasakan manfaat program pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Distrik Paniai Timur bahwa: "Masyarakat yang merasakan dampak positif dari kegiatan Dana Desa cenderung lebih peduli dan aktif mendukung program pembangunan kampung. Bantuan pertanian, pelatihan keterampilan, bantuan usaha kecil, dan kegiatan pemberdayaan lainnya memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan Dana Desa secara tepat sasaran".

Masyarakat Distrik Paniai Timur juga mulai memiliki sikap kritis terhadap penggunaan Dana Desa sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala kampung Iyaitaka bahwa: "Sikap kritis terhadap penggunaan Dana Desa terlihat ketika masyarakat mulai berani menyampaikan pendapat atau pertanyaan apabila terdapat kegiatan yang dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat". Masyarakat memahami bahwa Dana Desa merupakan anggaran milik masyarakat yang harus digunakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, masyarakat merasa memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan Dana Desa di kampung.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sikap gotong royong masyarakat juga menjadi salah satu bentuk perhatian masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Kampung Kogekotu bahwa: "Masyarakat tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah kampung, tetapi juga ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan secara langsung. Masyarakat bekerja bersama dalam kegiatan pembangunan, membantu pelaksanaan program pemberdayaan, dan mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan melalui Dana Desa".

Semangat kebersamaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan kampung. Kaum perempuan di Distrik Paniai Timur juga menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap penggunaan Dana Desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Kampung Pudotadi bahwa: "Perempuan mulai aktif mengikuti musyawarah kampung dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi keluarga. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan pembangunan menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami pentingnya partisipasi seluruh unsur masyarakat dalam mendukung keberhasilan program Dana Desa".

Selain perempuan, generasi muda atau pemuda kampung juga mulai menunjukkan sikap peduli terhadap pembangunan kampung melalui penggunaan Dana Desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Kaur Keuangan Kampung Iyaitaka bahwa: "Pemuda terlibat dalam kegiatan sosial, pelatihan keterampilan, kegiatan olahraga, dan kegiatan kepemudaan lainnya yang didukung oleh Dana Desa".

Keikutsertaan pemuda dalam kegiatan tersebut menunjukkan adanya kesadaran generasi muda untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan masyarakat kampung. Perhatian masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa juga terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Kaur Keuangan Kampung Kogekotu bahwa: "Masyarakat mulai meminta agar pemerintah kampung memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan Dana Desa, jenis kegiatan yang dilaksanakan, dan manfaat yang diperoleh masyarakat".

Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut masyarakat merasa lebih percaya terhadap pemerintah kampung dan lebih mudah ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan. Dalam kehidupan sosial masyarakat Distrik Paniai Timur, sikap saling mengingatkan dan peduli terhadap kepentingan bersama menjadi bagian penting dalam penggunaan Dana Desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Kaur Keuangan Kampung Pudotadi bahwa: "Apabila terdapat masyarakat atau aparat kampung yang dianggap kurang tepat dalam

melaksanakan kegiatan, maka masyarakat biasanya menyampaikan masukan melalui musyawarah kampung atau pendekatan secara kekeluargaan”.

Meskipun demikian, secara umum masyarakat Distrik Paniai Timur menunjukkan sikap yang positif dan peduli terhadap penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat mulai menyadari bahwa keberhasilan pembangunan kampung sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Kesadaran tersebut menjadi modal penting dalam menciptakan pembangunan kampung yang partisipatif dan berkelanjutan.

Masyarakat berharap agar pemerintah kampung terus meningkatkan keterbukaan informasi dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses penggunaan Dana Desa. Masyarakat juga menginginkan agar kegiatan pemberdayaan masyarakat lebih diarahkan pada kebutuhan masyarakat secara nyata sehingga manfaat Dana Desa dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat kampung.

Secara keseluruhan, perhatian dan sikap masyarakat Distrik Paniai Timur dalam kepekaan terhadap penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat menunjukkan adanya perkembangan yang positif. Masyarakat mulai memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi, mengawasi, dan mendukung pelaksanaan program pembangunan kampung secara bersama-sama.

Dengan demikian perhatian sikap masyarakat distrik paniai timur dalam kepekaan terhadap penggunaan Dana Desa Untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan penggunaan Dana Desa di Distrik Paniai Timur. Melalui sikap peduli, keterlibatan aktif, dan semangat kebersamaan masyarakat, diharapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara efektif, transparan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung secara berkelanjutan. Namun masih terdapat kendala yang sering disampaikan yaitu sebagian masyarakat yang kurang memahami mekanisme penggunaan Dana Desa dan masih merasa kesulitan memahami laporan penggunaan anggaran atau prosedur pelaksanaan kegiatan desa serta masih terdapat sebagian masyarakat yang bersikap pasif.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya, terutama untuk menjawab permasalahan yang dipertanyakan pada bab I penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai masih belum berjalan dengan baik sesuai dengan teori atau kurang berhasil. Indikasi dari hal tersebut terlihat pada hal-hal berikut: a) Dimensi *Pemungkinan*, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan program dan penggunaan Dana Desa, serta belum meratanya kesempatan, fasilitas, dan akses transportasi yang menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan; b) Dimensi *Penguatan*, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, keterbatasan tenaga pendamping dan pelatih, serta kurang memadainya sarana pelatihan yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan belum optimal; c) Dimensi *Perlindungan*, masih terdapat masyarakat yang kurang aktif mengikuti musyawarah kampung karena kesibukan kerja dan keterbatasan informasi pelaksanaan musyawarah; d) Dimensi *Penyokongan*, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, keterbatasan sarana, pendampingan, dan anggaran Dana Desa, serta tingginya biaya transportasi yang menghambat pelaksanaan kegiatan secara optimal; e) Dimensi *Pemeliharaan*, rendahnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan Dana Desa, sikap masyarakat yang masih pasif, serta sulitnya akses wilayah yang menghambat pembinaan secara merata.

Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai antara lain: Faktor pendukung meliputi partisipasi masyarakat dan komitmen aparat kampung sedangkan faktor penghambat tindakan Bupati mengangkat kepala kampung tanpa syarat dan bupati mengalihkan Dana Desa untuk kegiatan lain yang tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa. Upaya mengatasi faktor penghambat pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Distrik Paniai Timur Kabupaten

Paniai antara lain: Memperbaiki mekanisme pengangkatan kepala kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemerintah kampung dan pemerintah daerah perlu memperkuat komitmen dalam melaksanakan pembangunan sesuai dokumen perencanaan desa.

REFERENSI

- Adi, Isbandi Rukminto. 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Depok: Fisip UI Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bintarto, R. 2010. *Desa Kota*. Bandung: Alumni.
- Dwidjowijoto & Wrihatnolo. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex.
- Hamid, Hendrawati. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Herlianto Didit. 2017. *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Publishing.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mardikanto, dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto & Poerwoko Soebianto. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Maryani, D dan Roselin, R. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhadam, Labolo. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Kelapa Gading.
- Naldjoeni. 1998. *Geografi Kota dan Desa (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Alumni.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Rusidi. 2002. *Pedoman Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: UPT Penerbitan Ikopin.
- Simangungsong, Fernandes. 2014. *Transformasi Organisasi: Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan*. Bandung: Alfabeta.
- Soerjono, Soekanto, & Mustafa Abdullah. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 2016. *Sosial Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali press.
- Soemantri, Bambang. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jatinangor: Fokusmedia.
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto. Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika.
- Sulistiyan, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumaryadi, I. N. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Stoner, James dkk. 1996. *Manajemen Edisi Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Tahir, 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni Sri & Sriyanto Darmawan. 2022. *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat*. Medan: PT Inovasi Pratama Internasional.
- Wasistiono, Sadu. 2004. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Wasistiono, Sadu & Tahir Irwan. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Widodo, S. E. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Widjaja AW. 2009. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT. Raja. Grafindo
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Kencana.